



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 1 (2023), pp. 69-78

DOI: [10.15408/sjsbs.v10i1.29284](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.29284)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Solok (Studi Kasus Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Serentak 2019)*

Resti Helfia,¹ Aidinil Zetra,² Roni Ekha Putra³

Universitas Andalas Padang



[10.15408/sjsbs.v10i1.29284](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.29284)

Abstract

This study aims to explain and evaluate the performance of the Solok City KPU in the process of compiling the voter list update and to analyze the factors that impede the performance of the Solok City KPU. This research uses qualitative methods and case study methods. The results of the study concluded that the various stages of the Thorok City KPU data updating program agenda were carried out in accordance with the stages and schedules that had been set as well as the rules of the election organizers, but did not optimally analyze the capacity of the election organizers. If left unchecked, the overcapacity of the mandate holders in carrying out their mandated duties will have a negative impact on the quality of the work of the executive branch in the upcoming election. This was later correlated with the obstacles to the performance of Solok City KPU officials when updating the voter lists in the 2019 elections.

Keywords: Evaluation; Performance; KPU

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengevaluasi kinerja KPU Kota Solok dalam proses penyusunan pemutakhiran daftar pemilih dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat kinerja KPU Kota Solok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode studi kasus. Hasil kajian menyimpulkan bahwa berbagai tahapan agenda program pemutakhiran data KPU Kota Thorok dilakukan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan serta aturan penyelenggara pemilu, namun tidak secara maksimal menganalisis kapasitas penyelenggara pemilu. Overkapasitas para pemegang mandat dalam menjalankan tugas yang diamanatkannya, jika dibiarkan akan berdampak negatif terhadap kualitas kerja lembaga eksekutif pada pemilu mendatang. Hal itu kemudian dikorelasikan dengan penghambat kinerja petugas KPU Kota Solok saat pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu 2019.

Kata Kunci: Evaluasi; Kinerja; KPU

*Received: December 8, 2022, Revision: December 14, 2022, Published: February 16, 2023.

¹ **Resti Helfia** adalah Mahasiswa Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Email: restihelfia@gmail.com

² **Aidinil Zetra** adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

³ **Roni Ekha Putra** adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

A. PENDAHULUAN

Kota Solok yang merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang juga melaksanakan Pemilu Serentak tahun 2019. Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan pada Pemilu Serentak 2019 sebanyak 47.418 pemilih.⁴ Akan tetapi pada hari pemungutan suara masih terdapat pemilih yang belum terdaftar pada daftar pemilih sehingga menggunakan KTP elektronik atau Surat Keterangan dari Dinas Dukcapil Kota Solok. Bertambah jumlah pemilih menjadi 50.192 di Kota Solok disebabkan cukup banyaknya pemilih mengurus pindah memilih ke Kota Solok sejumlah 644 pemilih yang dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Selain itu, yang menjadi permasalahan adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih cukup banyak yaitu 2.130 pemilih, angka ini menunjukkan bukti bahwa masih banyaknya pemilih yang belum terdaftar dalam data pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Solok.

Laporan dari Bawaslu RI melalui data Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) tahun 2019, menunjukkan bahwa Kota Solok berada pada indeks kerawanan tinggi, dimana Kota Solok masuk ke dalam 8 (delapan) besar Kabupaten/Kota yang IKP nya masuk kedalam kategori kerawanan tinggi > 66,00. Skor IKP Kota Solok yakni 68,59 dengan uraian Dimensi; Konteks Sosial Politik 37,38; Penyelenggaraan Pemilu Bebas dan Adil 71,79; Kontestasi 87,12 ; dan Partisipasi Politik 78,06.⁵

Permasalahan diatas menjelaskan bahwa penelitian perlu dilakukan dengan mengangkat permasalahan penelitian yaitu: Bagaimana kinerja KPU Kota Solok dalam pemutakhiran data pemilih pada Pemilu Serentak tahun 2019 dimana masih banyak pemilih yang memenuhi syarat (MS) tidak terdaftar dalam DPT dan pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) masih terdaftar di DPT? Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengevaluasi kinerja KPU Kota Solok dalam proses penyusunan pemutakhiran daftar pemilih pada pemilihan umum serentak tahun 2019.

Tinjauan Pustaka

Teori *Performance Appraisal* (Evaluasi Kinerja) Gary Dessler mempunyai 3 langkah dalam melakukan evaluasi kinerja yaitu:⁶ 1) *Defining jobs*: melakukan penetapan standar dalam bekerja, 2) *Appraising performance*: standar yang ditetapkan perusahaan dalam menilai kinerja, 3) *Feedback sessions*: Sejauh mana pelaksanaan pekerjaan memperoleh masukan yang jelas dan cepat dalam arti sejauh mana prestasi kerja dilakukan. Dalam menguraikan teori diatas, Dessler menggunakan 5 (lima) indikator evaluasi kinerja yaitu: 1) Kualitas pekerjaan, 2) Kuantitas pekerjaan, 3) Kepemimpinan (supervise) yang diperlukan, 4) Kehadiran, 5) Konservasi.

⁴ Kota Solok Kpu, "Ba No: 156/Pk.01-Ba/01/Kpu-Kot/Xii/2018" (Kpu Kota Solok, n.d.), 1-4.

⁵ Bawaslu RI, "Ringkasan Eksekutif Pemutakhiran Indeks Kerawanan Pemilihan Umum 2019," Book (Jakarta: Bawaslu RI, 2019), hlm. 49,
<https://drive.google.com/drive/folders/1IMCiL7SFheM4k56rAFsXxYhv0JnNIIY4>.

⁶ Ndraha, *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru), Jakarta, Rineka Cipta, 2011, Hlm. 208

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dilakukan untuk menggambarkan realita empiric dibalik fenomena Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dalam Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Serentak 2019, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku menggunakan metode deskriptif⁷ dengan pendekatan studi kasus.⁸ Goetz & LeCompte menjelaskan strategi pengumpulan data melalui teknik interaktif dan noninteraktif.⁹ Informan kunci penelitian sebanyak 21 orang. Analisis data dengan tahapan yaitu: reduksi data, display, verifikasi (menarik kesimpulan). Uji keabsahan data menggunakan triangulasi data.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Teori *Performance Appraisal* (Evaluasi Kinerja) oleh Gary Dessler,¹⁰ didefinisikan sebagai sebuah kerangka pemikiran untuk menganalisis 3 (tiga) langkah dalam melakukan evaluasi kinerja, yaitu: *Defining jobs*, *Appraising performance*, dan *Feedback sessions*, kemudian dalam menguraikan teori tersebut, Dessler menggunakan 5 (lima) indikator evaluasi kinerja, yakni; Kualitas pekerjaan, Kuantitas pekerjaan, Kepemimpinan (supervisi), Kehadiran, dan Konservasi. Untuk melihat apakah hasil kerja KPU Kota Solok dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2019 telah sesuai atau tidaknya dengan standar kerja yang telah ditetapkan oleh KPU RI.

1. Evaluasi Kinerja KPU Kota Solok dalam Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu Serentak tahun 2019

Langkah *Defining jobs* evaluasi kinerja milik Dessler, bahwa KPU Kota Solok dalam melaksanakan Pemilu 2019 khususnya pada tahapan pemutakhiran data telah menjalankan pelaksanaan tersebut berdasarkan alur kerja serta aturan yang ditetapkan oleh KPU RI. Dibuktikan dari setiap pelaksanaan tahapan pemutakhiran KPU Solok mengikuti standar kerja pemutakhiran sesuai dengan Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU No. 7 tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal kepemiluan.

⁷ Moleong Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), Hlm. 131

⁸ Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Moleong (2016:3), mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif sebagaizz prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berdasarkan data

⁹ Goetz J. P and LeCompte M. D, *Ethnography and Qualitative Design in Educational Research*. (San Diego: Academic Press, 1984).

¹⁰ Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 208.

Diuraikan dengan 5 indikator Dessler dimana dari indikator:

1. Kualitas tercermin bahwa KPU Kota Solok beserta jajaran didalamnya dimulai dari Komisioner, staf sekretariat, hingga PPK, PPS dan Pantarlih semuanya paham dan tahu dengan jelas apa standar kerja, SOP, aturan yang melekat yang diterapkan oleh KPU sebagai lembaga pelaksana pemilih, dan mereka menyepakati apa-apa saja tugas yang diberikan oleh KPU Kota Solok. Tugas pada pemutakhiran data pemilih, semua pelaksana tugas memahami akan tanggungjawab pemutakhiran data, dimana mereka harus bekerja secara akurat dan penuh ketelitian. Terkait dengan selisih data yang terjadi dalam setiap tahapan pemutakhiran, dapat mereka jelaskan bahwa hal tersebut diterangkan sebagai perbedaan angka dalam setiap penetapan daftar pemilih dimulai dari DP4 hingga DPT akhir, yang mana akan ada pergerakan penambahan atau pengurangan angka pemilih dalam rentan waktu pencoklitan data disetiap tahapannya baik di tingkat PPS, PPK, dan KPU.
2. Kuantitas, bahwa setiap tahapan, pencapaian dan konskuensi dari pelaksanaan pemutakhiran data yang dilakukan oleh petugas dapat dimengerti dan dipahami oleh pelaksana tugas, tercermin bahwa setiap tugas pemutakhiran yang dilakukan pelaksana tugas dapat dipertanggungjawabkan keakurasiannya. Dimana pendataan yang dilakukan oleh pantarlih dilakukan langsung turun ke lapangan mendata penduduk, sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan oleh KPU. Terkait ke akurasi data pemilih, KPU Kota Solok langsung melakukan monitoring ke lapangan terhadap semua tahapan kerja yang dilakukan oleh pelaksana, tentunya hal ini berdasarkan tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh undang-undang dan KPU RI.
3. Kepemimpinan (Supervisi), bahwa Ketua KPU Kota Solok paham akan tugas dan tanggungjawab yang diemban tercermin dari sikap Ketua KPU yang sigap dalam mengambil setiap langkah dan kebijakan baik berupa langkah preventif maupun kuratif, agar pelaksanaan pemutakhiran data dapat berlangsung dengan baik dimana hasilnya adalah data yang komprehensif.
4. Kehadiran, tercermin dari setiap tahapan pelaksanaan pemutakhiran dalam hal ini rapat pleno penetapan tentunya dihadiri oleh perangkat kerja di KPU Kota Solok sendiri, dan *steakholder* lainnya diluar KPU seperti Bawaslu, Muspida beserta Muspika, aparat keamanan, dan perwakilan Parpol.
5. Konservasi, tercermin dari langkah pencegahan ketidak validan data pemilih yang dilaksanakan oleh pelaksana tugas disetiap tahapannya dilakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian. Dimana data yang diturunkan oleh KPU Kota Solok berupa DP4 dicocokkan oleh petugas dengan mendatangi ke rumah-rumah warga, dengan mencocokkan data tersebut menggunakan e-KTP dan KK warga, lalu melakukan pembaharuan terhadap temua data dilapangan, semua tahapan ini sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh KPU RI. Tidak hanya itu, KPU Kota Solok juga menyediakan aplikasi cek NIK dengan tujuan agar warga dapat melihat apakah NIK-nya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum.

Kemudian, diikuti oleh penilaian pada langkah *Appraising performance*, bahwa KPU Kota Solok dalam melaksanakan tugas pemutakhiran data pemilih, secara sistem sudah melaksanakan instruksi KPU RI dengan benar, termasuk dalam mengimplementasikan sistem data elektronik Sidalih. Namun disisi lain, KPU Kota Solok kurang melakukan pertimbangan terhadap penetapan jumlah petugas pelaksana dengan porsi tugas yang diemban, masih ditemuinya petugas dengan porsi tugas ganda atau lebih saat pelaksanaan pemutakhiran data pemilih. Diuraikan dengan 5 indikator Dessler dimana dari indikator:

1. Kualitas, tercermin dari ketika KPU Kota Solok melaksanakan pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan akurat dan teliti dalam mencocokkan dan menganalisa data pemilih ke rumah-rumah warga yang disandingkan dengan e-KTP dan atau KK pemilih. Pelaksanaan pemutakhiran data yang dilakukan oleh KPU Kota Solok pada Pemilu 2019 sesuai dengan apa yang termaktub dalam PKPU No. 11 tahun 2018. kemudian untuk membantu pelaksanaan tugas, maka KPU menerapkan SIDALIH sebagai sistem yang baru diterapkan untuk meminimalisir kegandaan data pemilih. Pasca Pemilu 2019, KPU RI melakukan perbaikan sistemnya dengan mengeluarkan PKPU No. 6 tahun 2021 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
2. Kuantitas, secara hukum bahwa KPU Kota Solok dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KPU RI dimana terdapat pembagian tugas yang jelas tentunya sesuai dengan PKPU tentang tata kerja KPU yakni PKPU No. 8 tahun 2019, namun secara fakta pelaksanaan masih belum optimal dalam penetapan jumlah petugas disetiap bagiannya, dimana masih terdapat petugas sekretariat yang *double job* fungsinya, lalu pada petugas lapangan yakni PPS dengan cakupan area luas dan jumlah penduduk padat disama ratakan jumlahnya dengan petugas yang cakupan wilayahnya kecil dan jumlah penduduknya sedang. Lalu, untuk operator Sidalih jumlah hanya satu untuk meng-*input* semua data pemilih di Kota Solok, ini yang nantinya dapat mengakibatkan terjadinya peluang *human error*, sehingga hasil kerja yang dikeluarkan dapat tidak sesuai atau tidak maksimal.
3. Kepemimpinan (Supervisi), Ketua KPU sebagai pimpinan tertinggi di KPU Kota Solok telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh undang-undang, Ketua KPU Kota Solok juga memiliki integritas yang bagus dalam memimpin lembaga, dimana setiap tahapan pelaksanaan selalu melakukan supervisi, monitoring, koordinasi dan memberikan motivasi kepada staf dibawahnya.
4. Kehadiran, KPU Kota Solok dalam melaksanakan tahapan agenda pemutakhiran data dapat dikategorikan telah sesuai dengan tahapan agenda yang telah ditetapkan, meskipun masih dijumpai ada keterlambatan dan ketidak disiplin dari beberapa petugas namun tidak menjadikan program, agenda dan tahapan menjadi terganggu, dan tetap bisa dipertanggungjawabkan.
5. Konservasi, tercermin dari kebijakan pencegahan yang diambil oleh KPU Kota Solok agar pelaksana dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif. Beberapa

point yang diambil dari evaluasi pemilu sebelumnya dijadikan landasan oleh KPU Kota Solok untuk mengambil kebijakan tersebut, termasuk dalam hal penguatan kapabilitas dari pelaksana tugas penyelenggara pemilu.

Terakhir, yakni penilaian pada langkah *Feedback Sessions*, kesimpulan analisis berdasarkan data penelitian yang sudah peneliti kumpulkan bahwa KPU RI telah melakukan analisa terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pemilu sebelumnya, sehingga dengan analisa tersebut menjadi refleksi untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih baik dalam sistem kepemiluan, salah satunya terkait sistem pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB), yang didukung dengan sistem elektronik Sidalih sebagai *tools* yang membantu petugas dalam menganalisa data pemilih agar komprehensif. Namun, sangat kurang dalam melakukan analisa terhadap beban kerja pelaksana pemilu yang terdapat pada Pemilu 2019 dengan jumlah pelaksana tugas yang cenderung tidak sesuai jumlahnya, mengakibatkan terjadinya ketidak optimalan dalam berkinerja. Dibuktikan dengan jumlah operator 1 orang melakukan peng-*input*-an data pemilih se Kota Solok, dan kebanyakan pekerjaan tersebut dilakukan hingga tengah malam, ditambah adanya permasalahan buruknya jaringan saat penginputan data berlangsung. Lalu jumlah staf sekretariat KPU yang sedikit dimana mereka juga mengalami *double job* dalam waktu penyelesaian pekerjaan yang hampir bersamaan, tidak hanya itu kesesuaian jumlah PPS yang tidak dianalisa mengakibatkan ada PPS yang kewalahan dengan cakupan wilayah kerja yang dikerjakan oleh 1 orang PPS dimana wilayah kerja yang luas atau jumlah penduduk yang padat dalam satu kelurahan. Diuraikan dengan 5 indikator Dessler dimana dari indikator:

1. Kualitas, KPU Kota Solok dalam melaksanakan tugas pemutakhiran data pada Pemilu 2019 sudah dapat dikatakan menyelesaikan pekerjaan dengan baik, yang ditandai dengan tahapan agenda program pemutakhiran data dilakukan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan, dan juga patuh terhadap aturan pelaksana pemilu. Koordinasi antar penyelenggara juga dijalin dengan baik agar menghasilkan data pemilih yang komprehensif.
2. Kuantitas, telah terjadi *over capacity* dalam pelaksanaan tugas yang diemban baik oleh staf pendataan di KPU maupun petugas dilapangan, yang apabila dibiarkan menimbulkan dampak yang butuk terhadap kualitas pekerjaan bagi petugas pelaksana pada pemilu berikutnya.
3. Kepemimpinan (Supervisi), dalam pelaksanaan kerja oleh petugas pelaksana pemutakhiran di KPU Kota Solok, terlihat sangat puas akan nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh Ketua KPU yang dinilai sebagai figur yang berintegritas, sehingga para pelaksana termotivasi dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya.
4. Kehadiran, bahwa kedisiplinan dari pelaksana tugas dalam melaksanakan setiap tahapan, program dan agenda pelaksanaan Pemilu sangat diutamakan. KPU Kota Solok dalam melakukan perekrutan petugas PPK, PPS, Pantarlih menerapkan beberapa klasifikasi untuk mendudukkan orang yang tepat, salah satunya klasifikasinya terkait nilai integritas dan akuntabilitas petugas pelaksana.

5. Konservasi, bahwa KPU Kota Solok sebagai lembaga pelaksana pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2019 lalu, telah melakukan penganalisaan terhadap semua alur tahapan pemutakhiran data pemilih dengan mengambil suatu kebijakan preventif dalam menghadapi persoalan dan kendala yang akan ditemui pada tahapan tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Kota Solok telah melaksanakan semua tahapan pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2019 dengan baik, dimana KPU Kota Solok melaksanakan semua tahapan tersebut berpedoman kepada Undang-undang Pemilu dan Peraturan Pelaksana yang berlaku pada saat itu. Untuk memutakhirkan data pemilih agar data tersebut komprehensif, maka KPU Kota Solok dengan tahapan program yang tersusun melakukan berkali-kali pemvalidasian data, dimulai dari DPS, DPSHP1, DPSHP2, DPTHb, DPTHP1, DPTHP2, DPTHP3. Tentunya semua tahapan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan dibawah pengawasan Bawaslu bersama *stakeholder* terkait. Selain itu, KPU juga menggunakan sistem berbasis elektronik bernama SIDALIH dalam penginputan data pemilih disetiap tahapannya, yang berfungsi sebagai *tolls* untuk konsolidasi data pemilih.

Proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan rangkaian akhir dari suatu proses pemutakhiran pemilih Pemilu yang cukup krusial, karena menyangkut masalah kependudukan atau data penduduk yang sering kali tidak akurat, dianalisa berdasarkan teori langkah evaluasi kinerja Dessler yang disandingkan dengan kejadian yang harusnya dilaksanakan yakni berpedoman dengan Undang-undang pemilu serta peraturan pelaksanaanya (evaluasi Model *das Solen-das Sein*), maka faktor penghambat dari kinerja pelaksana tugas di KPU Kota Solok dalam pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu 2019, yakni; Faktor Kuantitas

Dapat peneliti uraikan, dalam segi faktor kuantitas, KPU Kota Solok kurang melakukan penganalisaan terhadap porsi beban kerja pada Pemilu serentak 2019 terlebih dahulu sebelum melaksanakan penyelenggaraan tahapan pemutakhiran, dimana sistem pemilu 2019 merupakan sistem pemilu yang berbeda dari sistem pemilu sebelumnya (tervalidasi dalam analisis evaluasi kinerja Dessler pada langkah *Appraising performance*), kemudian selain itu, KPU Kota Solok juga tidak memetakan dan menganalisa porsi jumlah staf yang ada di tingkat sekretariat KPU Kota Solok, akibatnya dengan porsi beban kerja yang begitu banyak mengakibatkan ada petugas yang mendapatkan bobot kerja ganda atau *double job*, yang mengakibatkan terjadinya *human error* dan kelebihan kapasitas dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, akibatnya terdapat kesalahan menghitung data pemilih dalam mengerjakan laporan kegiatan tahapan pemilu 2019 oleh KPU Kota Solok.

Selain itu, terdapat pula porsi jumlah PPS yang tidak sesuai dengan cakupan wilayah kerja yang diemban, dimana ada beberapa kelurahan di Kota Solok yang ternyata memiliki luas geografis yang lebih besar dan jumlah penduduk yang lebih padat, akibatnya dalam pencocokan data bisa memakan waktu yang lama dari agenda penetapan. (tervalidasi dalam dalam analisis evaluasi kinerja Dessler pada langkah *Feedback Sessions*).

D. KESIMPULAN

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi kinerja KPU Kota Solok pada Pemilu 2019 dengan studi kasus pemutakhiran data pemilih, peneliti menggunakan Teori Gary Dessler *Performance Appraisal* bersama 5 indikatornya sebagai pisau analisis, kemudian peneliti juga menggunakan evaluasi Model das Solen-das Sein milik Dessler sebagai kerangka dalam membangun analisis ini.

Defining jobs, diketahui bahwa KPU Kota Solok telah mengimplementasikan aturan yang telah ditetapkan. Semua perangkat kerja di KPU Kota Solok paham, mengerti dan patuh akan standar bekerja yang diterapkan dalam hal ini undang-undang kepegawaian dan aturan pelaksana, ditandai dengan kesepakatan atas porsi tugas yang diembankan kepada pelaksana tugas. Kemudian semua pelaksana tugas juga paham akan tuntutan kerja dalam menghasilkan data pemilih yang komprehensif dengan mengutamakan ketelitian, kecermatan dan keakuratan pencocokan data.

Appraising performance, bahwa KPU Kota Solok secara sistem sudah melaksanakan pembaharuan sistem sesuai dengan instruksi KPU RI, salah satunya pengimpelentasian sistem Sidalih yang difungsikan sebagai *tolls* mengolah data pemilih. Di sisi lainnya, terdapat kurangnya pertimbangan dari KPU Kota Solok terhadap bobot kerja pelaksana dengan kuantitas pelaksana tugas. Dalam penetapan jumlah petugas disetiap bagiannya dinilai belum optimal yang dapat mengakibatkan terjadinya peluang *human error* berakibat kepada hasil kerja tidak maksimal.

Feedback sessions, bahwa KPU RI telah melakukan analisa terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pemilu 2019, sehingga dengan analisa tersebut menjadi refleksi untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih baik dalam sistem kepegawaian, salah satunya terkait sistem pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB), dan disupport dengan sistem pendataan elektronik Sidalih sebagai *tools* yang membantu petugas dalam menganalisa data pemilih agar komprehensif.

REFERENSI:

- Arfah, Sitti Rahmawati. 2021. Penilaian Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bontoala Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020. *Journal I La Galigo: Public Administration Journal* 4, no. 1: 1–9. <https://unanda.ac.id/ojs/index.php/ilagaligo/article/view/729>.
- Arif, Mokhammad Samsul. 2019. Reformulasi Model Penyuaan Paska Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proporsional Daftar Terbuka. *Jurnal Wacana Politik* Vol. 4, no. No.2 (Oktober).
- Bawaslu RI, "Ringkasan Eksekutif Pemutakhiran Indeks Kerawanan Pemilihan Umum 2019," Book (Jakarta: Bawaslu RI, 2019), https://drive.google.com/drive/folders/1IMCiL7SFheM4k56rAFsXxYhv0JnNII_Y4
- C, Voss, Tsikriktis N, and Frohlich M. 2002. Case Research in Operations Management. *International Journal of Operations & Production Management* 22, no. 2.

- Carl V, Patton, and Sawicki David. S. 1986. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. New York: Prentice Hall: Englewood Cliffs.
- CNN Indonesia. —Bawaslu Sebut Ada 7.132 Pelanggaran Selama Pemilu 2019, April 23, 2019, Nasional Politik edition. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423121842-32-388784/bawaslu-sebut-ada-7132-pelanggaran-selama-pemilu-2019>
- CNN Indonesia. —PKS Sebut Pemilu 2019 Terburuk Sejak Reformasi, April 23, 2019, Nasional Politik edition. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423124058-32-388795/pks-sebut-pemilu-2019-terburuk-sejak-reformasi>
- Dessler, Gary. 1997. *Human Resource Management*. Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- E.H, Marihot. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian, Dan Peningkatan Produktivitas Pegawai)*. Cetakan Pertama Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Fachrudin, Achmad. 2019. MENAKAR PEMILU SERENTAK 2019. *Jurnal Pengawasan Pemilu; Bawaslu DKI Jakarta*, no. Bab 6: 119 42. <https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.11474454.V1>.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik. I*. Semarang.: Widya Karya. https://www.researchgate.net/publication/317341846_Kebijakan_Publik
- Harris, Ben M. 1985. *Supervisory Behavior in Education*. Yersey: Prentice Hall.Inc., Englewood Cliffs.
- Hasibuan, Malayu. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengertian Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. <https://nasional.sindonews.com/berita/797889/12/ini-dpt-bermasalah-versi-bawaslu>
<https://www.idea.int/sites/default/files/publications/electoral-justice-handbook-%20overview-ID.pdf>.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Ini DPT Bermasalah Versi Bawaslu. Accessed April 19, 2022.
- International Idea. —Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA. IDEA-Cetro-Bawaslu RI: Jakarta, 2011
- J. P, Goetz, and LeCompte M. D. 1984. *Ethnography and Qualitative Design in Educational Research*. San Diego: Academic Press.
- Junaidi, Veri, Fadli Ramadhanil, and Firmansyah Arifin. 2016. *EVALUASI PENEGAKAN HUKUM PEMILU 2014*. Yayasan Perludem, Jakarta, n.d., <http://perludem.org/wp-content/uploads/2016/11/Evaluasi-Penegakan-Hukum-%20Pemilu-2014.pdf>
- Karlina, N. M. D., N. N. D. Pascarani, and P. E. Purnamaningsih. 2015. *Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Dalam Proses Pemutakhiran*

- Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Desa Dalung Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Badung Tahun 2015. Citizen Charter 1, no. 1: 165249.
- KOTA SOLOK KPU, "BA No: 156/PK.01-BA/01/KPU-Kot/XII/2018" (KPU KOTA SOLOK, n.d.)
- Lexy, J, Moleong. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Malik, Saleh Abdul. 2020. Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Poso. Katalogis 4, no. 11. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/7136/5733>.
- Manah, Fortunatus Hamsah. 2021. Pemetaan Persoalan Data Pemilih Jelang Pemilu 2024. *Opini.Mediaindonesia.com*, Agustus. <https://mediaindonesia.com/opini/429356/pemetaan-persoalan-data-pemilih-%20jelang-pemilu-2024>.
- Nasution. 1992. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). 1. Jakarta: Rineka Cipta.
- PEMILU 2019 DAN UJIAN INTEGRITAS PENEYELENGGARA-PUSKOPAL FISIP UI. <https://www.puskapol.ui.ac.id/sports/pemilu-2019-dan-ujian-integritas-penyelenggara.html>
- Provus, Malcolm. 1971. Discrepancy Evaluation for Educational Program Improvement and Assessment. Barkeley, California: McCutchen Pu. Corp.
- Riniwati, Harsuko. 2011. Mendongkrak Motivasi Dan Kinerja: Pendekatan Pemberdayaan SDM. Malang: UB Press.
- Rivai, Veithzal. 2004. Manajemen Sumberdaya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Safitri, A, A.S Muhammad, and Y.S Adiputra. 2021. Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Melalui Sosialisasi Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih (Studi Pemilihan Anggota Dprd Kota Tanjungpinang 2019). *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan ilmu politik* 2, no. 1: 1–9. <https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/article/view/741/637>.
- Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana S. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosadakarya.
- Sutisna, Agus; and Ita Nurhayati. 2021. Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan: Tantangan Problematik Mewujudkandaftar Pemilih Berkualitas. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 1 (November): 70–96. <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.296>.
- Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS.
- William, Wiersma. 1986. Research Methods In Education: An Introduction. Massachusetts: Allyn and Bacon, Inc.
- Yin, Robert K. 2015. Qualitative Research from Start to Finish. Second. New York; London: Guilford Publications.